

**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGREJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-11
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-13
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGREJO

PERATURAN DESA KEDUNGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungrejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kedungrejo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO
dan
KEPALA DESA KEDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungrejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kedungrejo dibantu Perangkat Desa Kedungrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungrejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungrejo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kedungrejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2022

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2022

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2022

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun
2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

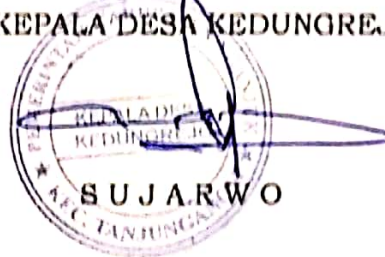
BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungrejo.

Ditetapkan di Kedungrejo
pada tanggal 20 September 2022
KEPALA DESA KEDUNGREJO



Diundangkan di Kedungrejo
pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DESA KEDUNGREJO,



LEMBARAN DESA KEDUNGREJO TAHUN 2022 NOMOR 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
20. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungrejo Tahun 2019 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kedungrejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kedungrejo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp 2.294.386.770,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	2.294.386.770	2.294.386.770	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	400.080.000	400.080.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	400.080.000	400.080.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.894.306.770	1.894.306.770	
4.2.1.	Dana Desa	1.307.574.000	1.307.574.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	101.625.770	101.625.770	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	485.107.000	485.107.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.294.386.770	2.294.386.770	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Kedungrejo sebesar Rp 2.294.386.770,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
5.1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.468.000	39.468.000	
5.1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.904.000	266.904.000	
5.1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.400.000	20.400.000	
5.1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran Pakaian dinas dll)	154.673.250	106.796.752	
5.1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000	34.500.000	
5.1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan dinas)	14.380.000	14.380.000	
5.1.1.7	Kegiatan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000	72.000.000	
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	269.280.000	269.280.000	
5.1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
5.1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.200.000	13.220.000	
5.1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.833.235	5.000.000	
5.1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0	0	
5.1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	433.000	0	
5.1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.075.000	15.000.000	
5.1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
5.1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah	7.500.000	12.000.000	

	Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			
5.1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	3.200.000	8.000.000	
5.1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.793.280	4.419.299	
5.1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.900.000	4.000.000	
5.1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.500.000	5.000.000	
5.1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.725.000	2.620.000	
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	50.000.000	50.000.000	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan			
5.1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.500.000	8.500.000	
5.1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.444.020	37.444.020	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan			
5.2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000	36.000.000	
5.2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	1.200.000	0	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan			
5.2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)	8.400.000	8.400.000	
5.2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	209.460.000	211.860.000	
5.2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	118.305.920	24.000.000	
5.2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.925.000	9.500.000	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
5.2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	0	94.469.000	
5.2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0	99.339.000	
5.2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	21.600.000	0	
5.2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	80.716.800	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen	49.914.800	203.286.100	

	ingkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)			
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0	65.083.800	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
5.2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000	4.000.000	
5.2.8	Sub Bidang Pariwisata			
5.2.8.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)	150.000.000	200.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
5.3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	5.000.000	
5.3.1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	0	5.000.000	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
5.3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	2.500.000	
5.3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	10.000.000	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
5.3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.387.000	5.000.000	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
5.3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	7.000.000	
5.3.4.3	Pembinaan PKK	12.200.000	10.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
5.4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat, produksi/pengelolaan /kandang)	150.000.000	0	
5.4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000	40.000.000	
5.4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
5.4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0	2.000.000	
5.4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0	6.000.000	
5.4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	0	5.500.000	

5.4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	8.000.000	
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
5.4.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	50.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.3.00	Kegiatan BLT DD	529.200.000	108.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.294.386.770	2.294.386.770	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kedungrejo

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	39.468.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.904.000	266.904.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.000.000	20.000.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	139.499.286	154.673.250
05	Penyediaan Tunjangan BPD	38.700.000	34.500.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.700.000	14.380.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000	72.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	269.280.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.000.000	12.220.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000	9.833.235
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	0	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	433.000	433.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.000.000	4.075.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.000.000	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000	0
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	8.000.000	7.500.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.000.000	3.200.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.000.000	8.793.280
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.000.000	3.900.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000	
06	Penyusunan Kebijakan Desa	10.000.000	6.500.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.000.000	4.725.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000	0
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	50.000.000	50.000.000
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	8.500.000
02	Administrasi Pertanahan	0	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Penyuluhan Pertanahan	0	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.000.000	37.444.020
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 92 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kcpala Dcsa	39.468.000	26.312.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.904.000	177.939.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.400.000	10.787.387	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	154.673.250	103.330.930	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000	18.150.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	14.380.000	0	Tidak Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000	36.000.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	269.280.000	157.080.000	Belum Tercapai
9.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	12.220.000	12.220.000	Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.833.235	9.833.235	Tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	433.000	0	Tidak Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.075.000	0	Tidak Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.500.000	2.500.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 92 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kcpala Dcsa	39.468.000	26.312.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.904.000	177.939.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.400.000	10.787.387	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	154.673.250	103.330.930	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000	18.150.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	14.380.000	0	Tidak Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000	36.000.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	269.280.000	157.080.000	Belum Tercapai
9.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	12.220.000	12.220.000	Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.833.235	9.833.235	Tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	433.000	0	Tidak Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.075.000	0	Tidak Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.500.000	2.500.000	Belum Tercapai

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.200.000	1.600.000	Belum Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8.793.280	4.643.280	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.900.000	0	Tidak Tercapai
17.	Penyusunan Kebijakan Desa	6.500.000	0	Tidak Tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.725.000	2.700.000	Tidak Tercapai
19.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	50.000.000	0	Tidak Tercapai
20.	Forum Pembina Desa	4.800.000	1.600.000	Belum Tercapai
21.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.500.000	0	Tidak Tercapai
22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.444.020	1.875.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 13 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	57.600.000	36.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	0	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.900.000	8.400.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	170.000.000	209.460.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	0	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000	118.305.920
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.000.000	14.925.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	40.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	191.937.500	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	195.024.000	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	21.600.000	21.600.000
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	49.914.800	49.914.800
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	10.000.000	0
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	6.000.000	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	4.000.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	0
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	4.000.000	2.400.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	150.000.000
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 71 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	36.000.000	33.300.000	Belum Tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	900.000	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.400.000	6.300.000	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	209.460.000	159.315.000	Belum Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	118.305.920	83.403.120	Belum Tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.925.000	11.425.000	Belum Tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	21.600.000	21.600.000	Tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	49.914.800	49.914.800	Tercapai
9.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.400.000	2.400.000	Tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	100.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	(Satlinmas Desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0	0
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	8.000.000	5.387.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	0	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.200.000	7.200.000
03	Pembinaan PKK	24.200.000	12.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0	0
90	Pembinaan Karang Taruna	9.080.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 60 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.387.000	0	Tidak Tercapai
2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	0	Tidak Tercapai
3.	Pembinaan PKK	12.200.000	7.125.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APB Desa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	150.000.000	150.000.000
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	129.578.000	40.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000	0
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	250.000.000	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 40 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/belum tercapai
1.	Peningkatan Produksi Peternakan	150.000.000	0	Tidak Tercapai
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000	40.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000	0
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
	BLT – DD	39.600.000	529.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 50 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
	BLT – DD	529.200.000	396.900.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal karena jumlah aparatur pemerintah kurang dan hal SDM kurang penguasaan IT, manajemen serta pelayanan kepada masyarakat kurang memadai.
- Dukungan Sarana / Prasarana dalam kinerja masih terbatas.
- Tata kelola administrasi dan pelaporan masih rendah.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Terlambatnya pengiriman material
- Kondisi dan cuaca yang kurang mendukung
- Perubahan anggaran dari pembangunan untuk penanganan pandemic.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Kurangnya Fasilitas Keamanan Lingkungan.
- Sarana dan Prasarana Olah Raga Kurang memadai.
- Kurangnya Pembinaan Karang Taruna /Ketrampilan Pemuda.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi lembaga desa.
2. BUMDesa kurang maksimal dalam pengelolaan manajemen.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Adanya pengalihan anggaran disebabkan adanya Pandemic.
2. Tidak adanya kesadaran dalam kesiapsiagaan terhadap bencana yang ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Kedungrejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Menyusun Laporan Kepala Desa;
 - 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
 - 2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
 - 3) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyelenggaraan sub bidang Kesehatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Poskesdes
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 4) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau BKB

- b. Pelaksanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 1) Pemeliharaan Jalan Desa.
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
 - 3) Pembangunan/Peningkatan jalan lingkungan Permukiman/Gang
 - 4) Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 5) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - c. Pelaksanaan sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
 - d. Pengembangan Wisata Desa
 - 1) Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Pelaksanaan sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (Satlinmas Desa)
 - b. Pelaksanaan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - 1) Pengiriman Kontingen Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kec dan Kab.
 - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan tingkat desa
 - c. Pelaksanaan sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 1) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
 - d. Pelaksanaan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 1) Pembinaan LPM
 - 2) Pembinaan PKK
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai ;
 - 1) Kegiatan Normalisasi Saluran
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
 - 1) Pelatihan Kepala Desa
 - 2) Pelatihan Perangkat Desa
 - 3) Pelatihan BPD
 - c. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 1) Pelatihan Keterampilan Tata boga/Tata busana
 - d. Dukungan Penanaman Modal;
 - 1). Penyertaan Modal BUMDesa

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Penanganan Keadaan Mendesak;

1). Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, Epdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023**

SA : KEDUNGREJO
CAMATAN : TANJUNGANOM
BUPATEN : NGANJUK
OVINSI : JAWA TIMUR

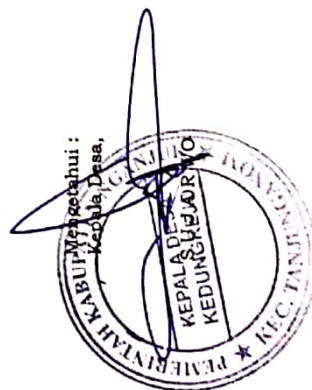
Bidang/ Jenis Kegiatan														Rencana a Pelaksa na Kegiatan		
Bidang	Nama Program/ Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			
										Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa		Kerjasa ma Pihak Ketiga	
2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			1,2,3,18	1 Org	1 Org	12 OB	Kades	Desa Kedungrejo	39,468,000	ADD	V		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1,2,3,18	11 Org	11 Org	132 OB	Perangkat Desa	Desa Kedungrejo	266,904,000	ADD	V		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			3	11 Org	11 Org	1 Paket	Perangkat Desa	Desa Kedungrejo	20,400,000	ADD	V		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			1,2,18	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	Pemdes	Desa Kedungrejo	106,796,752	PAD, ADD, BHPRD	V		
	5	Penyediaan Tunjangan BPD			1,18	12 Bln	12 Bln	1 Tahun	BPD	Desa Kedungrejo	34,500,000	PAD, ADD	V			
	6	Penyediaan Operasional BPD			1,18	12 Bln	12 Bln	1 Tahun	BPD	Desa Kedungrejo	14,380,000	PAD	V			
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			1,2,18	720 OB	720 OB	720 OB	RT/RW	Desa Kedungrejo	72,000,000	ADD	V			
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa			1,2,3,18	12 Bln	12 Bln	1 Tahun	Kades dan Perangkat Ds	Desa Kedungrejo	269,280,000	PAD	V			
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	13,220,000	PAD	V		
2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			9,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	5,000,000	PAD	V			
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa			1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	15,000,000	DDS	V		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			9,10,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	2,000,000	DDS	V		
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			5,16,17,18	8 Kali	8 Kali	8 Kali	Masyarakat	Desa Kedungrejo	12,000,000	DDS	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana a Pelaksa na Kegiatan						
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga							
	Pelaporan	2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,16,17,18	8 Kali	8 Kali	8 Kali	Masyarakat	Desa Kedungrejo	8,000,000	DDS	V									
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,16,17,18	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Masyarakat	Desa Kedungrejo	4,419,299	DDS	V									
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,16,17,18	4 Paket	4 Paket	4 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	4,000,000	DDS	V									
		6 Penyusunan Kebijakan Desa	5,16,17,18	5 Paket	5 Paket	5 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	5,000,000	DDS	V									
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9,18	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	2,620,000	PAD	V									
		90 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	50,000,000	PAD	V									
		91 Forum Pembina Desa	16,17,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	4,800,000	ADD	V									
		1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pemdes	Desa Kedungrejo	8,500,000	DDS	V									
		6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,2,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	37,444,020	BHP	V									
		7 Penetapan Batas Desa	1,2,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pemdes	Desa Kedungrejo	37,444,020	BHP	V									
Jumlah Bidang 1									1,033,176,091											
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																			
1	Pendidikan	1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,2,4,5	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Guru PAUD/TK/ Ngaji	Desa Kedungrejo	36,000,000	DDS	V									
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,3,4,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Lembaga Pendidikan Masyarakat	Desa Kedungrejo	5,000,000	DDS	V									
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1,3,4,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	36,000,000	DDS	V									
		8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,3,4,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pengurus Perpustakaan	Desa Kedungrejo	2,000,000	DDS	V									
		10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1,3,4,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Gakrin	Desa Kedungrejo	10,000,000	DDS	V									
		1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	1,3,5,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kader Desa	Poskesdes	8,400,000	DDS	V									
		2 Penyelenggaraan Posyandu	1,2,3,5,6	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	211,860,000	DDS	V									
		Jumlah Bidang 2																		
		2	Kesehatan	1 Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,2,4,5	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Guru PAUD/TK/ Ngaji	Desa Kedungrejo	36,000,000	DDS	V							
				2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,3,4,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Lembaga Pendidikan Masyarakat	Desa Kedungrejo	5,000,000	DDS	V							
3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1,3,4,9			1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	36,000,000	DDS	V									
8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,3,4,9			1 Paket	1 Paket	1 Paket	Pengurus Perpustakaan	Desa Kedungrejo	2,000,000	DDS	V									
10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1,3,4,9			1 Paket	1 Paket	1 Paket	Gakrin	Desa Kedungrejo	10,000,000	DDS	V									
1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	1,3,5,9			1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kader Desa	Poskesdes	8,400,000	DDS	V									
2 Penyelenggaraan Posyandu	1,2,3,5,6			1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	211,860,000	DDS	V									
Jumlah Bidang 3																				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana a Pelaksa na na Kegiatan
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,3,11	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Desa Kedungrejo	24,000,000	DDS	V			
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,2,3,5	1 Paket	1 Paket	Kader & Masyarakat	Desa Kedungrejo	9,500,000	DDS	V			
		1	Pemeliharaan Jalan Desa	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Surodadi	94,469,000	DDS	V			
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Kepuhbener	99,339,000	DDS	V			
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Bendungan, Johorejo	80,716,800	DDS	V			
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Kepuhbener, Bendungan	203,286,100	DDS	V			
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Kedungrejo, Barong	65,083,800	DDS	V			
		1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds. Kedungrejo,	10,000,000	DDS	V			
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1,2,8,9	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds. Kedungrejo,	5,000,000	DDS	V			
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	18	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	4,000,000	DDS	V			
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	10,000,000	DDS	V			
8	Pariwisata	2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	1,2,8,9,10	1 Unit	1 Unit	Masyarakat	Ds Kedungrejo	100,000,000	DDS	V			
Jumlah Bidang 2									1,014,654,700					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
	1	Keterampilan, Ketertarikan, dan Pelindungan Masyarakat	11	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	5,000,000	DDS	V			
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan/Keterampilan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11	60 Org	60 Org	60 Orang	Linmas	Ds Kedungrejo	5,000,000	DDS	V			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana a Pelaksa na Kegiatan n
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Phak Ketiga	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	2,500,000	DDS	V			
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	10,000,000	DDS	V			
3	Kepemudaan dan Olah Raga	6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Karang Taruna	Ds Kedungrejo	5,000,000	DDS	V			
4		2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Masyarakat	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	LPM	Ds Kedungrejo	7,000,000	DDS, PAD	V			
		3 Pembinaan PKK	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	PKK	Ds Kedungrejo	10,000,000	DDS, PAD	V			
4	Jumlah Bidang 3													
2	Pertanian dan Peternakan	3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,8,9,10	1 paket	1 paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	10,000,000	DDS	V			
		4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,8,9,10	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Masyarakat	Ds Kedungrejo	40,000,000	DDS	V			
		5 Pelatihan/Bimtek/Pengenal Teknologi Tepat Guna untuk	1,2,8,9,10	1 paket	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	4,000,000	DDS	V			
3		1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,18	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Kades	Ds Kedungrejo	2,000,000	DDS	V			
		2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,18	11 Org	11 Org	11 Orang	Perangkat Ds	Ds Kedungrejo	6,000,000	DDS	V			
		3 Peningkatan kapasitas BPD	4,18	9 Org	9 Org	9 Orang	BPD	Ds Kedungrejo	5,500,000	DDS	V			
4	Pemberdayaan Perempuan, Dukungan Penanaman Modal	1 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5,8,10,18	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Masyarakat	Ds Kedungrejo	8,000,000	DDS	V			
6		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal				-			-					
		a. Penyertaan Modal BUMDes	4,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	BUMDes	Ds Kedungrejo	50,000,000	DDS	V			
	Jumlah Bidang 4													
	Jumlah Bidang 3													
1	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			1 paket	1 paket	1 Paket	Masyarakat	Ds Kedungrejo	5,000,000	DDS	V			
	00 Penanggulangan Bencana		1,2,8,10											

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana a Pelaksa na Kegiatan
	Bidang	Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
2	Kadaan Darurat	00 Kadaan Darurat				-			-					
3	Kadaan Mendesak	00 Kadaan Mendesak				-			-					
		BLT - DD	1,2,8,10	360 KPM	360 KPM	360 KPM	Masyarakat	Ds Kedungrejo	108,000,000	DDS	V			
Jumlah Bidang 5									113,000,000					
JUMLAH TOTAL									2,330,830,790					



Kedungrejo, 20 September 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)
W A S I S

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

